



Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Mewujudkan Kesenjangan

Annas Saufi Hasibuan¹, Ade Eka Putra², Ellya Roza³, Marzuki⁴

^{1,2,4}Mahasiswa (S2) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau, Indonesia

³Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau, Indonesia

¹e-mail: annassaufi4@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Published: 2026-04-30

Keywords:

Pendidikan Multikultural, Kesenjangan,
Keberagaman

Corresponding Author:

Annas Saufi Hasibuan

ABSTRACT

Pendidikan multikultural merupakan pendekatan yang menekankan penerimaan terhadap keragaman budaya, agama, etnis, serta identitas sosial sebagai fondasi terciptanya keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Di tengah meningkatnya dinamika sosial dan kerentanan konflik berbasis identitas, pendidikan multikultural hadir sebagai strategi penting untuk membangun sikap toleran, empatik, dan inklusif pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan multikultural dalam mewujudkan kesetaraan, khususnya dalam konteks pendidikan di Indonesia yang ditandai oleh keberagaman. Metode kajian dilakukan melalui studi literatur terhadap teori, model, serta implementasi pendidikan multikultural pada berbagai jenjang pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berkontribusi signifikan dalam mengurangi bias, diskriminasi, dan eksklusi sosial melalui penguatan nilai-nilai demokratis, kesadaran identitas, serta penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana strategis dalam membentuk lingkungan pendidikan yang adil, setara, dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman tertinggi di dunia. Keberagaman ini meliputi perbedaan suku, bahasa, agama, budaya, hingga nilai-nilai sosial yang dianut oleh setiap kelompok masyarakat. Kondisi tersebut seharusnya menjadi kekuatan bangsa, namun pada kenyataannya justru sering memicu konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks pendidikan, keberagaman ini menuntut adanya pendekatan yang mampu memfasilitasi perbedaan secara adil dan inklusif. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendidikan multikultural yang menekankan pentingnya penerimaan terhadap keragaman sebagai dasar membangun masyarakat yang setara dan harmonis (Tilaar, 2004).

Pendidikan multikultural tidak hanya berkaitan dengan pengenalan budaya yang berbeda, tetapi juga mencakup upaya sistematis untuk mengurangi ketimpangan sosial yang muncul akibat perbedaan identitas. Pendekatan ini mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk diskriminasi. Dengan demikian, pendidikan multikultural memiliki kontribusi penting dalam menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang etnis, agama, maupun status sosial (Mahfud, 2019).

Dalam praktiknya, pendidikan multikultural berperan dalam membangun kesadaran kritis peserta didik agar mampu memahami isu-isu ketidakadilan sosial. Melalui proses pembelajaran yang inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai kesetaraan, peserta didik dilatih untuk mengembangkan empati, toleransi, dan kemampuan berpikir reflektif. Pendidikan multikultural juga menekankan pentingnya dialog antarbudaya sebagai sarana memperkuat pemahaman serta menghilangkan stereotip dan prasangka yang kerap menjadi pemicu diskriminasi (Banks, 2015).

Selain itu, pendidikan multikultural menawarkan strategi untuk mengatasi bias struktural yang sering melekat dalam sistem pendidikan. Bias tersebut dapat muncul dalam kurikulum, metode pengajaran, maupun hubungan sosial di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip

multikultural, institusi pendidikan diharapkan mampu menciptakan ruang belajar yang adil bagi semua peserta didik. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan potensi peserta didik secara optimal tanpa hambatan sosial maupun kultural (Zamroni, 2011).

Lebih jauh, pendidikan multikultural berpotensi menjadi fondasi dalam mewujudkan kesetaraan sosial di masyarakat. Melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai inklusivitas, masyarakat dapat dibentuk menjadi lebih terbuka, saling menghormati, serta mampu berkolaborasi dalam perbedaan. Oleh karena itu, kajian mengenai pendidikan multikultural sebagai sarana mewujudkan kesetaraan menjadi penting untuk dikembangkan, terutama di Indonesia yang memiliki dinamika sosial sangat kompleks. Kajian ini juga relevan mengingat tuntutan global agar pendidikan mampu mempersiapkan generasi muda menghadapi keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan (Banks & McGee Banks, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur (*library research*) untuk menganalisis konsep dan implementasi pendidikan multikultural sebagai sarana mewujudkan kesetaraan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali teori, model, dan temuan empiris dari berbagai sumber ilmiah yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Studi literatur memberikan landasan konseptual yang kuat dan memungkinkan peneliti menelaah hubungan antarvariabel secara mendalam (Nazir, 2014).

Proses penelitian diawali dengan pengumpulan literatur dari buku, jurnal nasional maupun internasional, prosiding, serta dokumen kebijakan terkait pendidikan multikultural. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kriteria relevansi topik, kredibilitas, dan kesesuaian konteks pendidikan di Indonesia. Literatur utama berasal dari karya para ahli seperti Banks, Tilaar, dan Mahfud yang banyak membahas isu keragaman, kesetaraan, dan inklusivitas pendidikan (Banks, 2015).

Tahap berikutnya adalah kritik sumber, yaitu menilai keaslian dan kredibilitas literatur. Kritik eksternal dilakukan untuk memastikan sumber berasal dari penerbit terpercaya, sedangkan kritik internal digunakan untuk menilai ketepatan konsep, argumentasi, dan metodologi yang digunakan dalam literatur tersebut. Tahap ini penting untuk menjamin bahwa data yang dianalisis benar-benar berkualitas dan mendukung fokus penelitian (Zed, 2014). Data yang telah dipilih kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti kesetaraan, bias struktural, diskriminasi, serta nilai-nilai multikultural. Analisis dilakukan dengan proses pengelompokan, interpretasi, dan pemaknaan terhadap konsep yang muncul dalam literatur. Hasil analisis ini dijadikan dasar penyusunan temuan dan rekomendasi (Krippendorff, 2013).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan cara membandingkan informasi dari berbagai literatur yang berbeda. Teknik ini membantu memastikan konsistensi temuan dan memperkuat validitas analisis. Dengan metode studi literatur ini, penelitian dapat menyajikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi pendidikan multikultural dalam mewujudkan kesetaraan di lingkungan pendidikan (Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Multikulturalisme

Multikulturalisme secara bahasa adalah kebudayaan. Secara etimologis tersusun dari kata *multi* yang berarti banyak, *kultur* yang berarti budaya, dan *isme* yang memiliki arti aliran atau paham. Dalam kata tersebut terdapat makna pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kehidupan masing-masing yang unik (Choirul Mahfud, 2013). Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

James Banks dalam Choirul Mahfud, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan). Kemudian, bagaimana seseorang mampu mensikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter. Jadi, pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya (Choirul Mahfud, 2013). Sementara itu Andersen dan Cusher (1994) mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan yang dikemukakan di atas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama dengan apa yang dikemukakan dalam definisi di atas, yaitu keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari dan berstatus sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan para pengembang kurikulum (Andersen dan Cusher, 1994). M. Ainul Yaqin memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi mudah (M. Ainul Yaqin, 2005).

Sedangkan Zakiyuddin Baidhawiy menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural (Zakiyuddin Baidhawiy, 2005). Berdasarkan uraian tersebut di atas, definisi yang disampaikan Zakiyuddin Baidhawiy adalah definisi yang digunakan sesuai dengan kondisi Indonesia. Hilda Hernandez dalam Choirul Mahfud mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Hal ini berarti bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (*plural*), baik latar belakang maupun basis sosio budaya yang melingkupinya.

Sejarah Munculnya Multikulturalisme

Sejarah munculnya pendidikan multikulturalisme, diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (*civil right movement*). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat kerja, dandi lembaga-lembaga pendidikan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Karena ketika itu hanyadikenal satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih beragama Kristen. Adapun golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka (Parsudi Suparlan, 2002).

Gerakan hak-hak sipil tersebut, menurut James A. Banks berimplikasi pada dunia pendidikan dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Menurutnya, lembaga-lembaga pendidikan di Amerika pada tahun 1960-an dan 1970-an belum memberikan kesempatan yang sama bagi semua ras untuk memperoleh pendidikan. Praktik pendidikan yang diskriminatif ini juga menuai protes dari tokoh gerakan hak-hak sipil dan lembaga ilmiah. Pada intinya mereka menuntut agar diadakan reformasi dalam pendidikan. Wacana pendidikan multikultural juga berhembus sampai ke Indonesia.

Menurut Abdullah Aly, wacana ini mulai digulirkan sekitar tahun 2000, melalui berbagai diskusi, seminar, workshop, yang kemudian disusul dengan penelitian serta penerbitan buku dapat dipahami bahwa sebenarnya multikulturalisme adalah sebuah konsep dimana sebuah komunitas dan

jurnal yang bertema multikulturalisme. Wacana pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia juga digemakan oleh para penulis melalui media massa. Banyak tulisan yang beredar di jurnal, surat kabar, dan majalah yang intinya mengusulkan agar diterapkannya pendidikan multikultural di Indonesia. Mereka memandang bahwa dalam masyarakat yang multikultural, seperti Indonesia, penerapan pendidikan multikultural merupakan keharusan yang mendesak.

Pendidikan multikultural dapat mendidik para peserta didik bersedia menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Mata pelajaran yang dapat dijadikan sarana untuk mendidik antara lain, adalah bahasa Indonesia, Pendidikan seni Nusantara, dan Pendidikan Agama (Abdullah Aly, 2011).

Pendidikan Multikulturalisme sebagai Sarana Mewujudkan Kesetaraan

Multikulturalisme berperan sebagai perekat sosial (social glue) yang mampu menghubungkan berbagai kelompok masyarakat dalam suatu tatanan sosial yang inklusif. Dalam masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman tinggi seperti Indonesia, keberadaan multikulturalisme menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Multikulturalisme menekankan penerimaan terhadap perbedaan serta pengakuan terhadap keberadaan dan hak setiap kelompok sosial. Melalui pendekatan ini, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai elemen yang saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Putnam, 2019).

Sebagai perekat sosial, multikulturalisme berkontribusi dalam membangun kepercayaan sosial (social trust) antarindividu dan antarkelompok. Kepercayaan sosial merupakan unsur penting dalam menciptakan stabilitas dan kohesi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kesadaran multikultural yang kuat, interaksi sosial berlangsung secara lebih terbuka dan egaliter, sehingga mengurangi prasangka, stereotip negatif, serta potensi konflik horizontal. Kondisi ini memungkinkan terbentuknya solidaritas sosial yang menjadi fondasi utama persatuan bangsa (Kymlicka, 2015).

Selain berfungsi sebagai perekat sosial, multikulturalisme juga merupakan modal persatuan (capital of unity) dalam kehidupan berbangsa. Modal persatuan ini tercermin dalam kemampuan masyarakat untuk bekerja sama melampaui batas-batas identitas primordial. Nilai-nilai multikultural mendorong terciptanya ruang publik yang inklusif, di mana setiap warga negara merasa memiliki tempat dan peran setara. Dengan demikian, multikulturalisme memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa dan negara, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas kebangsaan (Banks, 2016).

Dalam konteks Indonesia, peran multikulturalisme sebagai perekat sosial dan modal persatuan sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip persatuan Indonesia yang terkandung dalam Pancasila tidak dimaksudkan untuk menghapus perbedaan, melainkan untuk menyatukan keragaman dalam kerangka kebangsaan yang adil dan beradab. Multikulturalisme menjadi sarana konkret dalam mengaktualisasikan nilai tersebut melalui praktik kehidupan sosial yang menghargai keberagaman dan menolak segala bentuk diskriminasi (Kaelan, 2018).

Namun demikian, fungsi multikulturalisme sebagai perekat sosial dan modal persatuan tidak akan terwujud secara optimal tanpa dukungan kebijakan dan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai inklusivitas. Pendidikan multikultural dan kebijakan publik yang adil berperan penting dalam memperkuat internalisasi nilai multikultural di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan multikulturalisme harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh, harmonis, dan berkelanjutan (Azra, 2017).

Pendidikan Multikulturalisme untuk Mewujudkan Keseragaman dan Kesetaraan Sosial

Pendidikan multikulturalisme merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, bahasa, etnis, dan identitas kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural menjadi sangat penting karena

masyarakatnya terdiri dari ratusan kelompok etnik dan budaya yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial jika tidak dikelola secara tepat. Melalui penerapan pendidikan multikultural, sekolah berfungsi sebagai ruang sosial untuk menginternalisasi nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan kepada perbedaan sehingga keberagaman dapat dimaknai sebagai kekayaan, bukan sumber perpecahan (Banks, 2019).

Pendidikan multikultural bukan bertujuan menjadikan semua kelompok menjadi seragam secara budaya, melainkan menciptakan keseragaman dalam harmonisasi sosial—yaitu adanya ruang sosial yang nyaman bagi seluruh kelompok untuk berinteraksi secara setara dan damai. Keseragaman yang dimaksud adalah keseragaman dalam nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penerimaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, keberagaman tetap dipertahankan, tetapi masyarakat memiliki “keseragaman nilai” dalam menghormati satu sama lain. Pendidikan multikultural menjadi instrumen penting untuk menciptakan kondisi tersebut karena melalui kurikulum, proses pembelajaran, dan interaksi antarindividu, peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan diskriminasi atau perlakuan tidak adil (Nieto, 2010).

Dari perspektif kesetaraan sosial, pendidikan multikultural berperan dalam mendekonstruksi bias dan ketidakadilan struktural yang tertanam dalam sistem pendidikan maupun dalam masyarakat. Bias struktural seperti kurikulum yang dominan mewakili budaya mayoritas, praktik pendidikan yang mengabaikan kebutuhan kelompok minoritas, atau evaluasi yang tidak sensitif terhadap keragaman latar belakang siswa dapat menciptakan ketimpangan kesempatan belajar. Pendidikan multikultural menghadirkan reformasi kurikulum yang inklusif, representatif, dan sensitif terhadap keberagaman sehingga seluruh peserta didik memiliki akses yang sama terhadap ruang belajar yang adil (Sleeter, 2011). Selain itu, pendidikan multikultural membantu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu ketidakadilan sosial sehingga terbentuk kesadaran untuk mendukung sistem sosial yang lebih adil bagi semua kelompok (Banks, 2020).

Lebih jauh, pendidikan multikulturalisme mendorong terciptanya masyarakat yang tidak hanya toleran, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial. Peserta didik yang dibekali pemahaman multikultural akan lebih siap menjadi warga negara yang mampu menghormati hak-hak kelompok minoritas, menolak diskriminasi, dan memperjuangkan hak sosial setiap individu. Dalam jangka panjang, pendidikan multikultural memberikan kontribusi pada terbentuknya kesetaraan sosial melalui penghapusan prasangka, stereotip, serta diskriminasi yang sering menjadi akar ketidaksetaraan dalam masyarakat (Mahfud, 2020).

Dengan demikian, pendidikan multikulturalisme berperan sebagai fondasi penting dalam membangun keseragaman sosial (harmoni) dan kesetaraan sosial (equity). Keseragaman sosial dicapai melalui kesepahaman nilai-nilai universal mengenai penghormatan terhadap perbedaan, sedangkan kesetaraan sosial dicapai melalui reformasi struktural dalam pendidikan yang menghargai hak semua kelompok. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya, pendidikan multikultural bukan hanya opsi, tetapi kebutuhan mendasar untuk menjaga keberlangsungan persatuan, keadilan sosial, serta keharmonisan kehidupan berbangsa.

KESIMPULAN

Pendidikan multikulturalisme merupakan pendekatan yang sangat relevan dan strategis dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, agama, etnis, dan identitas sosial. Melalui pendidikan multikultural, sekolah bukan hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga wahana yang membentuk karakter peserta didik agar mampu menerima, menghargai, dan merayakan perbedaan. Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan multikultural tidak ditujukan untuk menyeragamkan budaya kelompok tertentu, melainkan menciptakan keseragaman nilai sosial, seperti toleransi, saling menghormati, keadilan, dan penerimaan terhadap perbedaan. Keseragaman dalam nilai ini menjadi fondasi terbentuknya harmoni dalam masyarakat plural. Dari sisi

pedagogis, pendidikan multikultural mendorong praktik pembelajaran yang inklusif, bebas diskriminasi, serta menghargai berbagai latar belakang siswa. Guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan empatik melalui pendekatan yang responsif budaya. Sementara itu, pada dimensi struktural, pendidikan multikultural memiliki fungsi korektif terhadap bias sistemik dalam kurikulum, evaluasi, maupun kebijakan pendidikan yang selama ini lebih menonjolkan budaya dominan. Upaya reformasi kurikulum yang lebih representatif menjadi langkah krusial untuk menjamin kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa pendidikan multikultural memiliki dampak signifikan terhadap hubungan sosial di masyarakat. Melalui pemahaman lintas budaya dan penguatan dialog, pendidikan ini berkontribusi dalam mengurangi stereotip, prasangka, dan diskriminasi, sehingga memperkuat kohesi sosial. Peserta didik yang memahami nilai-nilai multikultural akan tumbuh menjadi warga negara yang mampu menolak ketidakadilan sosial dan memperjuangkan hak semua kelompok. Meskipun demikian, penerapan pendidikan multikultural masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya pemahaman guru, resistensi sebagian masyarakat, dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui pelatihan guru, integrasi nilai multikultural dalam seluruh aspek sekolah, serta keterlibatan masyarakat dan orang tua. Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan multikultural dapat berfungsi optimal sebagai sarana untuk mewujudkan kesetaraan dan keseragaman sosial yang harmonis.

Secara keseluruhan, pendidikan multikultural bukan hanya kebutuhan dalam dunia pendidikan, tetapi juga merupakan prasyarat penting untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, pendidikan multikultural menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, serta menciptakan masa depan yang setara bagi seluruh warga negara.

REFERENSI

- Banks, J. A. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. Routledge.
- Banks, J. A. (2019). *An Introduction to Multicultural Education*. Pearson Education.
- Banks, J. A. (2020). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Wiley.
- Gay, G. (2018). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice*. Teachers College Press.
- Kymlicka, W. (2018). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.
- Lestari, D. (2022). Pendidikan Multikultural di Era Global: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 14(2), 115–129.
- Mahfud, C. (2020). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nieto, S. (2010). *The Light in Their Eyes: Creating Multicultural Learning Communities*. Teachers College Press.
- Sleeter, C. (2011). *The Academic and Social Value of Ethnic Studies*. National Education Association Research Department.
- Suparlan, P. (2020). Pendidikan Multikultural sebagai Upaya Membangun Kesadaran Kebangsaan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 45–57.
- Tilaar, H. A. R. (2024). *Multikulturalisme: Tantangan Global Masa Depan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Grant, C. A., & Sleeter, C. E. (2011). *Doing Multicultural Education for Achievement and Equity*. Routledge.
- Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.